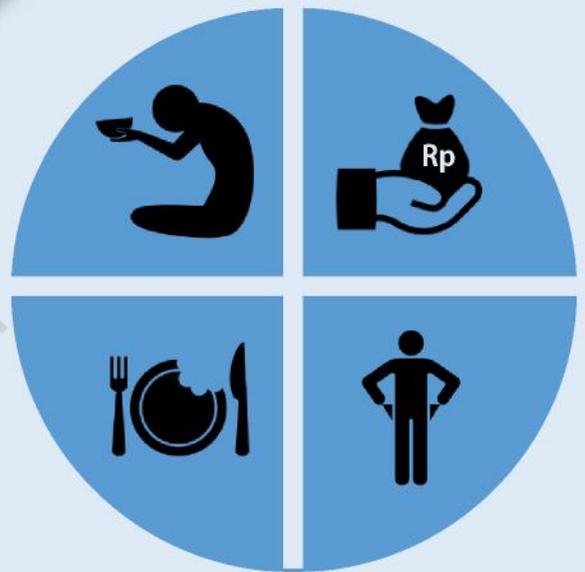


PERKEMBANGAN TINGKAT KEMISKINAN JAWA BARAT

September 2016



<https://jabar.bps.go.id>

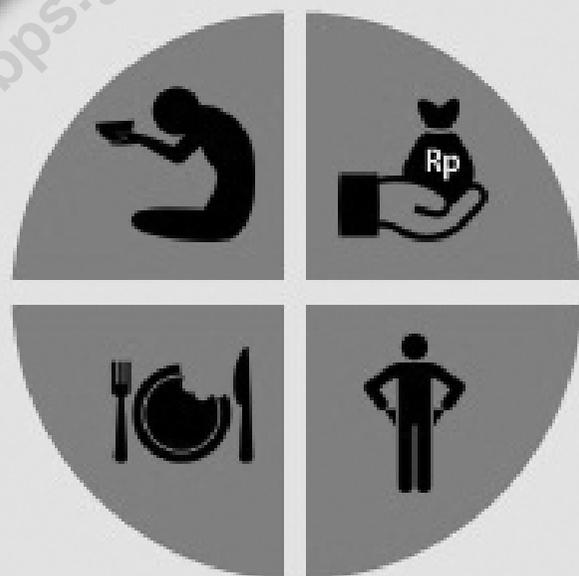


BADAN PUSAT STATISTIK
PROVINSI JAWA BARAT

PERKEMBANGAN TINGKAT KEMISKINAN JAWA BARAT

September 2016

<https://jabar.bps.go.id>



PERKEMBANGAN TINGKAT KEMISKINAN JAWA BARAT SEPTEMBER 2016

Katalog BPS : 3205011.32
No. Publikasi : 32520.1701
Ukuran Buku : 18,2 cm x 25,7 cm
Halaman : xii+16 halaman

Naskah :

Bidang Statistik Sosial BPS Provinsi Jawa Barat

Gambar Kulit :

Bidang Statistik Sosial BPS Provinsi Jawa Barat

Diterbitkan oleh :

© Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Barat

Dicetak oleh :

Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Barat

**Dilarang mengumumkan, mendistribusikan, mengomunikasikan, dan/atau
menggandakan sebagian atau seluruh isi buku ini untuk tujuan komersial tanpa
izin tertulis dari Badan Pusat Statistik**

PERKEMBANGAN TINGKAT KEMISKINAN JAWA BARAT SEPTEMBER 2016

Tim Penyusun

Penanggung Jawab Umum : Ir. Dody Herlando, M.Econ

Penanggung Jawab Teknis : Ir. Gandari Adianti Aju Fatimah, M.Si

Penulis & Pengolah Data : Esti Suciningtyas Pratiwi, S.ST

Penyunting/Editor : Judiharto Trisnadi, S.ST, MM

<https://labor.lms.go.id>

KATA PENGANTAR

Salah satu permasalahan utama yang terjadi di Indonesia adalah kemiskinan. Untuk membuat suatu kebijakan yang tepat dalam rangka penanggulangan kemiskinan diperlukan suatu data kemiskinan yang menyeluruh.

Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Jawa Barat telah merilis tingkat kemiskinan makro provinsi sejak tahun 2007. Mulai tahun 2011, BPS Provinsi Jawa Barat merilis tingkat kemiskinan sebanyak 2 kali dalam setahun yaitu keadaan bulan Maret dan bulan September. Untuk melengkapi ulasan yang disajikan pada Berita Resmi Statistik (BRS), BPS Provinsi Jawa Barat menyusun laporan eksekutif yang mengupas lebih dalam data kemiskinan. Laporan eksekutif BRS kemiskinan keadaan September 2016, disajikan dalam bentuk publikasi "Perkembangan Tingkat Kemiskinan Jawa Barat September 2016".

Diharapkan laporan ini dapat memberikan pemahaman tentang tingkat kemiskinan di Provinsi Jawa Barat. Semoga bermanfaat.

Bandung, Februari 2017

Kepala,



Dody Herlando

DAFTAR ISI

Kata Pengantar	v
Daftar Isi	vi
Daftar Tabel	vii
Daftar Gambar	viii
I. Pendahuluan	1
II. Perkembangan Tingkat Kemiskinan Provinsi Jawa Barat (Maret 2015 - September 2016)	3
III. Perubahan Garis Kemiskinan September 2015 - 2016	6
IV. Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) dan Indeks Keparahan Kemiskinan (P2)	11
V Tingkat Ketimpangan Pengeluaran Provinsi Jawa Barat (September 2015 - 2016)	13
VI. Penutup	16

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin Jawa Barat Menurut Daerah Maret 2015 – September 2016	3
Tabel 2. Komoditi yang Memberi Pengaruh Besar pada Kenaikan Garis Kemiskinan, September 2016	9

<https://jabar.bps.go.id>

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Persentase Penduduk Miskin Provinsi Jawa Barat menurut Klasifikasi Daerah (September 2015 – 2016)	4
Gambar 2. Persentase Penduduk Miskin Menurut Provinsi di Indonesia (September 2016)	5
Gambar 3. Perkembangan Garis Kemiskinan Provinsi Jawa Barat (September 2015 – September 2016)	7
Gambar 4. Perkembangan Garis Kemiskinan Makanan dan Non Makanan Provinsi Jawa Barat pada September 2016	7
Gambar 5. Peranan Komoditi Makanan dan Non Makanan Terhadap Garis Kemiskinan Provinsi Jawa Barat pada September 2016	8
Gambar 6. Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) Provinsi Jawa Barat (September 2015 – September 2016)	12
Gambar 7. Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) Provinsi Jawa Barat (September 2015 – September 2016)	13
Gambar 8. Perkembangan Gini Ratio Provinsi Jawa Barat menurut Klasifikasi Daerah (September 2015 – 2016)	14
Gambar 9. Distribusi Pengeluaran Penduduk Provinsi Jawa Barat pada September 2016	15

I. Pendahuluan

Salah satu poin kesepakatan dari seluruh bangsa di dunia yang tertuang dalam Millenium Development Goals (MDGs) adalah menanggulangi kemiskinan dan kelaparan sampai pada pertengahan tahun 2015. Di berbagai Negara, upaya untuk menekan angka kemiskinan juga masih belum menunjukkan capaian yang memuaskan. Hingga pada bulan September 2015, para pemimpin dunia menyepakati tujuan pembangunan global dalam Sustainable Development Goals (SDGs), dan kemiskinan masih merupakan salah satu poin penting yang ada dalam SDGs.

Kemiskinan sebagai salah satu poin untuk mengukur tingkat keberhasilan MDGs dan SDGS di suatu Negara. Namun, untuk mengukur kemiskinan diperlukan suatu konsep yang jelas. BPS sendiri memakai konsep kemiskinan yang dilihat dari kemampuan memenuhi kebutuhan dasar (*basic need approach*). Kemiskinan juga dipandang sebagai ketidakmampuan dari segi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan dan non makanan yang diukur dari sisi pengeluaran.

Suatu penduduk dikatakan merupakan penduduk miskin apabila memiliki rata-rata pengeluaran per kapita per bulan di bawah Garis Kemiskinan. Garis Kemiskinan merupakan suatu representasi dari jumlah rupiah minimum yang dibutuhkan untuk memenuhi kebutuhan pokok minimum makanan yang setara dengan 2100 kilo kalori per kapita per hari dan kebutuhan pokok bukan makanan. Garis Kemiskinan (GK) merupakan penjumlahan dari Garis Kemiskinan (GKM) dan Garis Kemiskinan Non Makanan (GKNM). Garis Kemiskinan Makanan (GKM) merupakan nilai pengeluaran kebutuhan minimum makanan yang disetarakan dengan 2100 kilo kalori per kapita per hari. Paket komoditi kebutuhan dasar makanan itu diwakili oleh 52 jenis komoditi yang meliputi padi-padian, umbi-umbian, ikan, daging, telur dan susu, sayuran, kacang-kacangan, buah-buahan,

minyak dan lemak, dan lain-lain. Sedang Garis Kemiskinan Non Makanan (GKNM) adalah kebutuhan minimum untuk perumahan, sandang, pendidikan dan kesehatan yang diwakili oleh 51 jenis komoditi di perkotaan dan 47 jenis komoditi di pedesaan.

Sumber data utama dalam menghitung Garis Kemiskinan adalah Survei Sosial Ekonomi Nasional (SUSENAS). Garis Kemiskinan yang dihasilkan hanya menggambarkan kondisi kemiskinan penduduk secara makro dikarenakan sumber data yang dipakai hanya berdasarkan survei. Kemiskinan makro ini tidak dapat menggambarkan siapa dan keberadaan penduduk miskin tersebut. Namun demikian, kemiskinan makro dapat digunakan untuk menggambarkan kemiskinan di suatu daerah serta membandingkan kemiskinan antar waktu dan daerah sehingga pemerintah bisa mengambil kebijakan untuk mengatasi kemiskinan tersebut dan juga bisa untuk evaluasi kebijakan penanggulangan kemiskinan.

Selama ini, pemerintah baik di tingkat pusat maupun daerah sudah dengan gencar melakukan berbagai program untuk penanggulangan kemiskinan. Anggaran yang begitu besar pun digulirkan untuk program pengentasan kemiskinan. Namun, berbagai program penanggulangan kemiskinan menjadi tidak efektif manakala di satu sisi pemerintah pun mengeluarkan kebijakan yang tidak pro dengan kemiskinan seperti kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM), kenaikan sejumlah harga kebutuhan pokok yang tidak bisa dikendalikan oleh pemerintah, kenaikan tarif dasar listrik serta akses infrastruktur yang kadang menghambat penduduk untuk mendapatkan informasi dan pelayanan umum baik di bidang kesehatan, pendidikan maupun yang lainnya. Kondisi seperti ini terjadi di hampir seluruh wilayah Indonesia termasuk Jawa Barat yang secara geografis dekat dengan ibukota Negara Republik Indonesia.

II. Perkembangan Tingkat Kemiskinan Provinsi Jawa Barat (Maret 2015 – September 2016)

Perkembangan tingkat kemiskinan pada kurun waktu bulan Maret 2015 – September 2016 di Jawa Barat menunjukkan penurunan kecuali pada September 2015. Pada keadaan Maret 2015, persentase penduduk miskin di Jawa Barat mencapai 9,53 persen (4,4 juta jiwa). Dan pada keadaan September 2015 mengalami kenaikan sebesar 0,04 persen menjadi 9,57 persen (4,49 juta jiwa). Kenaikan yang terjadi selama kurun waktu Maret – September 2015 disebabkan antara lain lemahnya kondisi perekonomian Indonesia yang dipengaruhi oleh kelesuan perekonomian global. Hal ini terjadi hampir di seluruh wilayah Indonesia.

Tabel 1. Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin Jawa Barat Menurut Daerah Maret 2015 – September 2016

Daerah/Tahun	Jumlah Penduduk Miskin (juta jiwa)	Persentase Penduduk Miskin (%)
[1]	[2]	[3]
Perkotaan		
Maret 2015	2,64	8,43
September 2015	2,71	8,58
Maret 2016	2,5	7,67
September 2016	2,54	7,55
Perdesaan		
Maret 2015	1,8	11,82
September 2015	1,78	11,61
Maret 2016	1,73	11,80
September 2016	1,62	11,72
Perkotaan + Desa		
Maret 2015	4,44	9,53
September 2015	4,49	9,57
Maret 2016	4,22	8,95
September 2016	4,17	8,77

Sumber : Data Susenas 2015-2016

Kemudian pada Maret 2016, persentase penduduk miskin di Jawa Barat mengalami penurunan yang signifikan sebesar 0,62 persen dibandingkan keadaan September 2015 yang mencapai 8,95 persen (4,22

juta jiwa). Dan pada keadaan September 2016, persentase penduduk miskin di Jawa Barat kembali menurun sebesar 0,18 persen (56,2 ribu jiwa) menjadi 8,77 persen (4,17 juta jiwa). Jika dilihat selama kurun waktu Maret 2015 - September 2016, persentase penduduk miskin Jawa Barat mengalami penurunan sebesar 0,80 persen. Hal ini menunjukkan perkembangan yang cukup baik, dalam artian pemerintah daerah berhasil dalam program pengentasan kemiskinan selama tahun 2015-2016.

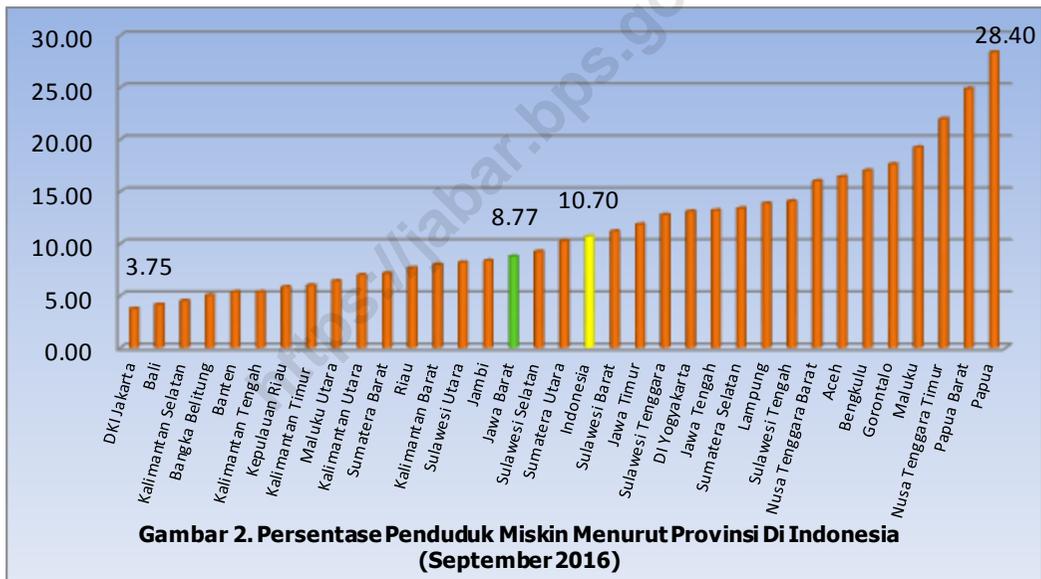
Dalam kurun waktu setahun terakhir secara absolut selama periode Maret 2015 – September 2016, penduduk miskin Jawa Barat di daerah perdesaan berkurang 172,51 ribu jiwa (dari 1,8 juta jiwa menjadi 1,62 juta jiwa). Sementara itu di perkotaan secara absolut juga mengalami penurunan sebanyak 95,08 ribu jiwa (dari 2,64 juta jiwa menjadi 2,54 juta jiwa).



Sumber : Data Susenas 2015-2016

Jika dilihat dari persentase, penduduk miskin yang tinggal di daerah perdesaan turun sebesar 0,08 persen (11,80 persen menjadi 11,72 persen). Begitu juga di daerah perkotaan turun 0,12 persen (dari 7,67 persen menjadi 7,55 persen). Secara umum, persentase penduduk miskin di daerah perdesaan lebih besar daripada perkotaan. Salah satu penyebabnya bisa

dimungkinkan karena akses dan infrastruktur yang kurang memadai di daerah perdesaan. Selain itu, kualitas sumber daya manusia di perdesaan masih lebih rendah dibandingkan perkotaan. Namun demikian, perbedaan perkembangan kemiskinan di perdesaan selama kurun waktu Maret – September 2016 semakin menyempit. Ini menunjukkan ada perbaikan perekonomian di daerah perdesaan. Dari gambaran ini, pemerintah masih punya pekerjaan rumah dalam penanggulangan kemiskinan. Pemerintah harus bisa mengendalikan stabilitas harga khususnya kebutuhan pokok sehingga kemampuan daya beli masyarakat bisa tetap terjaga.



Sumber : Data Susenas 2016

Jika dibandingkan dengan angka persentase penduduk miskin Indonesia, posisi Jawa Barat pada September 2016 berada di bawah angka nasional. Jika dilihat dari urutan persentase penduduk miskin yang terkecil, Provinsi Jawa Barat menempati urutan ke-16. Adapun persentase penduduk miskin yang terendah di Indonesia ditempati Provinsi DKI Jakarta dengan angka 3,75 persen dan yang terbesar yaitu Provinsi Papua dengan 28,40

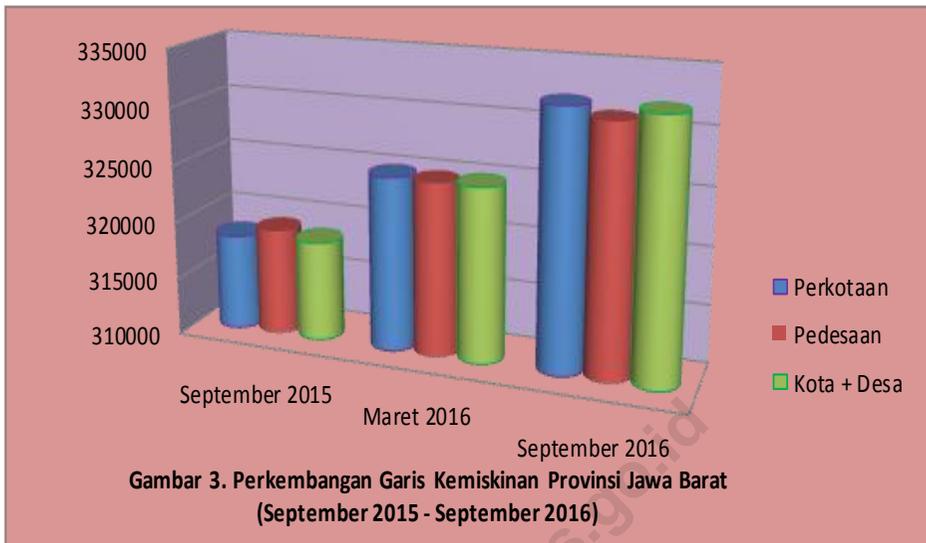
persen. Jika dilihat dari provinsi yang ada di Pulau Jawa, persentase penduduk miskin Provinsi Jawa Barat menempati posisi ketiga terkecil setelah Banten.

Penurunan persentase penduduk miskin dari 8,95 persen pada Maret 2016 menjadi 8,77 persen pada September 2016 dikarenakan beberapa faktor, diantaranya :

1. Adanya penurunan angka inflasi sebesar 0.3 poin yaitu dari 1,42 pada Maret 2016 menjadi 1,12 pada September 2016.
2. Adanya penurunan harga beras di tingkat penggilingan sebesar Rp 389,- yaitu dari Rp 9.696,- pada Maret 2016 menjadi Rp 9.307,-.
3. Pertumbuhan ekonomi pada Triwulan I 2016 ada di kisaran 0,44 persen sementara itu pertumbuhan ekonomi pada Triwulan III 2016 berkisar 0,95 persen. Adanya kenaikan pertumbuhan ekonomi dimungkinkan karena Triwulan III 2016 di Jawa Barat ada kegiatan PON yang cukup mempengaruhi perekonomian masyarakat.

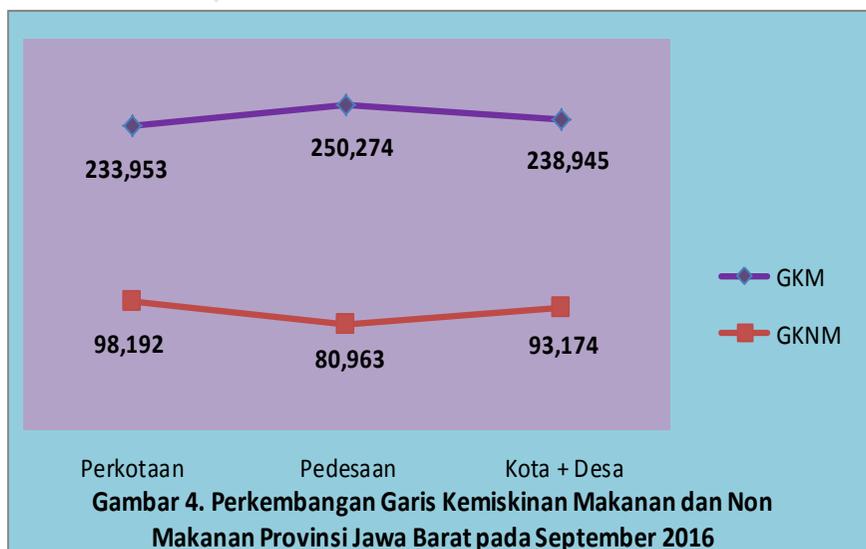
III. Perubahan Garis Kemiskinan September 2015 - 2016

Dalam proses penghitungan, besar kecilnya jumlah penduduk miskin sangat dipengaruhi oleh Garis Kemiskinan. Batasan penduduk miskin adalah penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran per kapita per bulan dibawah Garis Kemiskinan. Selama kurun waktu setahun dari September 2015 - 2016, Garis Kemiskinan naik dari Rp. 318.602,- pada September 2015 menjadi Rp. 332.119,- pada September 2016.



Sumber : Data Susenas 2015-2016

Apabila dilihat berdasarkan tipe daerah, GK perkotaan kenaikannya lebih tinggi dari Rp. 318.297,- pada September 2015 menjadi Rp. 332.145,- pada September 2016, sedangkan GK pedesaan mengalami kenaikan dari Rp 319.228,- menjadi Rp. 331.237,- .



Sumber : Data Susenas 2016

Garis Kemiskinan terdiri dari Garis Kemiskinan Makanan (GKM) dan Garis Kemiskinan Non Makanan (GKNM). Pada September 2016, Garis Kemiskinan Makanan sebesar Rp 238.945,- dan Garis Kemiskinan Non Makanan secara total sebesar Rp 93.174,-. Jika dibedakan antara perkotaan dan perdesaan, Garis Kemiskinan Makanan di perdesaan (Rp 250.274,-) lebih tinggi dibandingkan Garis Kemiskinan Makanan di perkotaan (Rp 233.953,-). Tetapi sebaliknya, untuk Garis Kemiskinan Non Makanan di perkotaan lebih tinggi dibandingkan di perdesaan (Rp 98.192,-) berbanding Rp 80.963,-.



Sumber : Data Susenas 2016

Peranan komoditi makanan terhadap garis kemiskinan sangat dominan dibandingkan peranan komoditi bukan makanan (perumahan, sandang, pendidikan, dan kesehatan). Hal ini menunjukkan bahwa pola konsumsi masyarakat pada tingkat ekonomi rendah lebih dominan untuk pengeluaran kebutuhan makanan dibandingkan non makanan. Sumbangan Garis Kemiskinan Makanan (GKM) terhadap Garis Kemiskinan (GK) sebesar 70,44 persen untuk daerah perkotaan. Sedangkan di daerah perdesaan

sebesar 75,56 persen. Secara total peranan komoditi makanan terhadap GK adalah sebesar 71,95 persen.

Tabel 2. Komoditi yang Memberi Pengaruh Besar pada Kenaikan Garis Kemiskinan, September 2016

Komoditi		Kota	Komoditi	Desa
(1)		(2)	(3)	(4)
Makanan				
1	Beras	19.67	Beras	26.76
2	Rokok kretek filter	11.65	Rokok kretek filter	8.70
3	Daging sapi	4.67	Telur ayam ras	3.67
4	Telur ayam ras	3.69	Daging ayam ras	3.64
5	Daging ayam ras	3.66	Daging sapi	3.25
Non Makanan				
1	Perumahan	11.09	Perumahan	9.67
2	Listrik	2.47	Bensin	1.77
3	Bensin	2.32	Listrik	1.65
4	Angkutan	2.20	Pendidikan	1.26
5	Pendidikan	2.06	Angkutan	1.14

Sumber : Data Susenas 2016

Jika dilihat pada komoditi yang menjadi penyumbang terbesar Garis Kemiskinan pada September 2016 baik itu di daerah perkotaan maupun di perdesaan, beras menjadi komoditi dengan urutan pertama. Di perkotaan, beras mencapai angka 19,67 persen sedang di perdesaan bisa mencapai 26,76 persen. Hal ini dikarenakan makanan utama dari sebagian besar penduduk Indonesia adalah beras, menjadi sangat penting untuk menjaga stabilitas harga beras.

Posisi kedua terbesar sebagai penyumbang Garis Kemiskinan adalah rokok kretek filter. Kondisi ini terjadi baik di daerah perkotaan maupun perdesaan. Sebenarnya kalau dilihat makanan yang menghasilkan kalori, rokok kretek tidak termasuk dalam hal ini. Namun karena rokok kretek ini banyak dikonsumsi oleh penduduk miskin sehingga tetap dimasukkan dalam

penghitungan Garis Kemiskinan. Komoditi rokok kretek filter memberikan sumbangan sebesar 11,65 persen untuk daerah perkotaan dan 8,70 persen di perdesaan.

Untuk komoditi selanjutnya terdapat perbedaan antara perkotaan dan perdesaan. Di perkotaan, daging sapi menempati urutan ketiga dengan 4,67 persen menyumbang Garis Kemiskinan. Komoditi daging sapi menjadi tiga terbesar di perkotaan dimungkinkan karena pada bulan September 2016 bertepatan dengan perayaan Hari Raya Idul Adha dan setelah perayaan Hari Raya Idul Fitri.

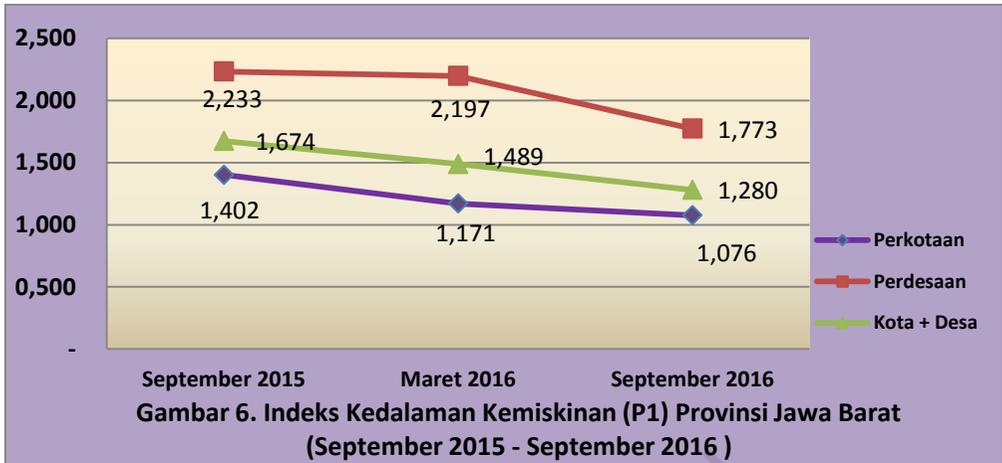
Komoditi yang menyumbang Garis Kemiskinan selanjutnya di perkotaan adalah telur ayam ras (3,69 persen) dan daging ayam ras (3,66 persen). Sedangkan di perdesaan, komoditi selanjutnya adalah daging ayam ras (3,64 persen) dan daging sapi di urutan kelima dengan 3,25 persen.

Untuk komoditi bukan makanan yang memberi sumbangan terbesar untuk Garis Kemiskinan di daerah perkotaan adalah perumahan yaitu sebesar 11,09 persen, listrik 2,47 persen, bensin 2,32 persen, angkutan 2,20 persen dan pendidikan sebesar 2,06 persen. Sedangkan lima komoditi bukan makanan penyumbang terbesar terhadap Garis Kemiskinan di daerah perdesaan secara berturut-turut adalah perumahan yaitu sebesar 9,67 persen, bensin 1,77 persen, listrik 1,65 persen, pendidikan sebesar 1,26 persen, dan angkutan 1,14 persen.

IV. Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) dan Indeks Keparahan Kemiskinan (P2)

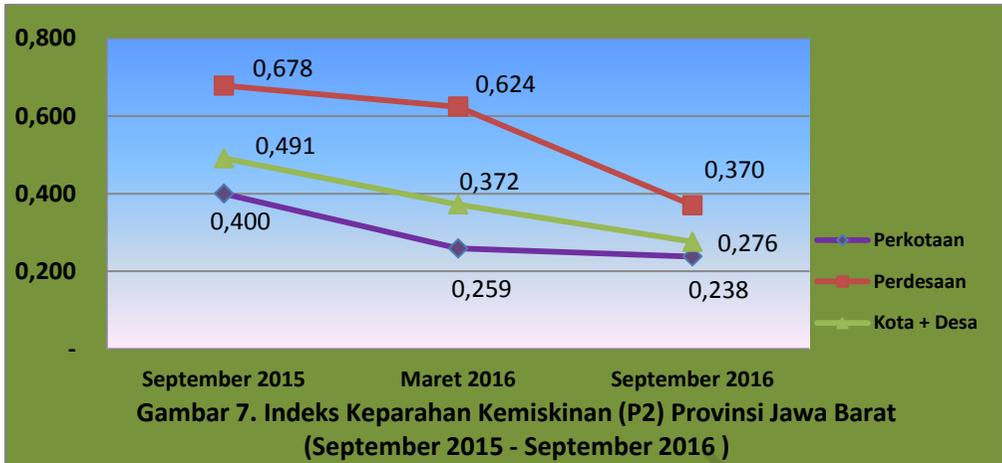
Persoalan kemiskinan bukan hanya sekadar berapa jumlah dan persentase penduduk miskin. Dimensi lain yang perlu diperhatikan adalah tingkat kedalaman dan keparahan dari kemiskinan. Selain harus mampu memperkecil jumlah penduduk miskin, kebijakan kemiskinan juga sekaligus harus bisa mengurangi tingkat kedalaman dan keparahan dari kemiskinan.

Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) merupakan ukuran rata-rata kesenjangan pengeluaran masing-masing penduduk miskin terhadap garis kemiskinan. Menurut Sistem Informasi Rujukan Statistik (Sirus) Badan Pusat Statistik (BPS), nilai dari Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) ini dapat digunakan untuk menunjukkan biaya mengentaskan kemiskinan dengan membuat target transfer yang sempurna terhadap penduduk miskin dalam hal tidak adanya biaya transaksi dan faktor penghambat. Semakin kecil nilai indeks kedalaman kemiskinan (P1), semakin besar potensi ekonomi untuk dana pengentasan kemiskinan berdasarkan identifikasi karakteristik penduduk miskin dan juga untuk target sasaran bantuan dan program. Penurunan nilai Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) mengindikasikan bahwa rata-rata pengeluaran penduduk miskin cenderung makin mendekati garis kemiskinan. Sedang Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) merupakan indeks yang memberikan informasi mengenai gambaran penyebaran pengeluaran di antara penduduk miskin. Semakin tinggi nilai Indeks Keparahan Kemiskinan (P2), semakin tinggi ketimpangan pengeluaran di antara penduduk miskin.



Sumber : Data Susenas 2015-2016

Pada periode September 2015 - 2016, Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) menunjukkan penurunan baik di wilayah perkotaan maupun perdesaan. Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) turun dari 1,674 pada keadaan September 2015 menjadi 1,280 pada keadaan September 2016. Penurunan nilai indeks ini mengindikasikan bahwa rata-rata pengeluaran penduduk miskin cenderung mendekati dari garis kemiskinan. Untuk wilayah perdesaan indeks kedalaman kemiskinan (P1) mengalami penurunan yaitu dari 2,233 pada bulan September 2015 turun menjadi 1,773 pada bulan September 2016. Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) di wilayah perkotaan juga mengalami penurunan yakni dari 1,402 pada September 2015 menjadi 1,076 pada September 2016. Nilai P1 di perkotaan pada umumnya lebih rendah dibandingkan dengan P1 di perdesaan. Ini bisa menjelaskan bahwa kondisi kemiskinan di daerah perkotaan lebih baik daripada di perdesaan dikarenakan rata-rata pengeluaran per bulan penduduk miskin mendekati Garis Kemiskinan (GK).



Sumber : Data Susenas 2015-2016

Dari hasil Susenas 2016, pada keadaan bulan September 2016 Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) Provinsi Jawa Barat mencapai 0,276. Selama kurun waktu September 2015 – 2016, Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) mengalami penurunan baik di daerah perkotaan maupun perdesaan. Tingkat keparahan kemiskinan (P2) di wilayah perdesaan turun dari 0,678 pada bulan September 2015 turun menjadi 0,370 pada bulan September 2016. Sedangkan tingkat keparahan kemiskinan (P2) di wilayah perkotaan turun dari 0,400 pada bulan September 2015 turun menjadi 0,238 pada bulan September 2016.

V. Tingkat Ketimpangan Pengeluaran Provinsi Jawa Barat (September 2015 – 2016)

Salah satu aspek kemiskinan yang perlu dilihat adalah distribusi pendapatan penduduk. Dikarenakan data mengenai pendapatan sulit diperoleh, maka pengukuran distribusi pendapatan selama ini menggunakan pendekatan data pengeluaran. Banyak ukuran yang digunakan untuk menggambarkan ketimpangan pendapatan, salah satunya dengan Gini Ratio. Nilai Gini Ratio ini berkisar antara 0-1. Semakin tinggi nilai Gini Ratio menunjukkan ketimpangan yang semakin tinggi.

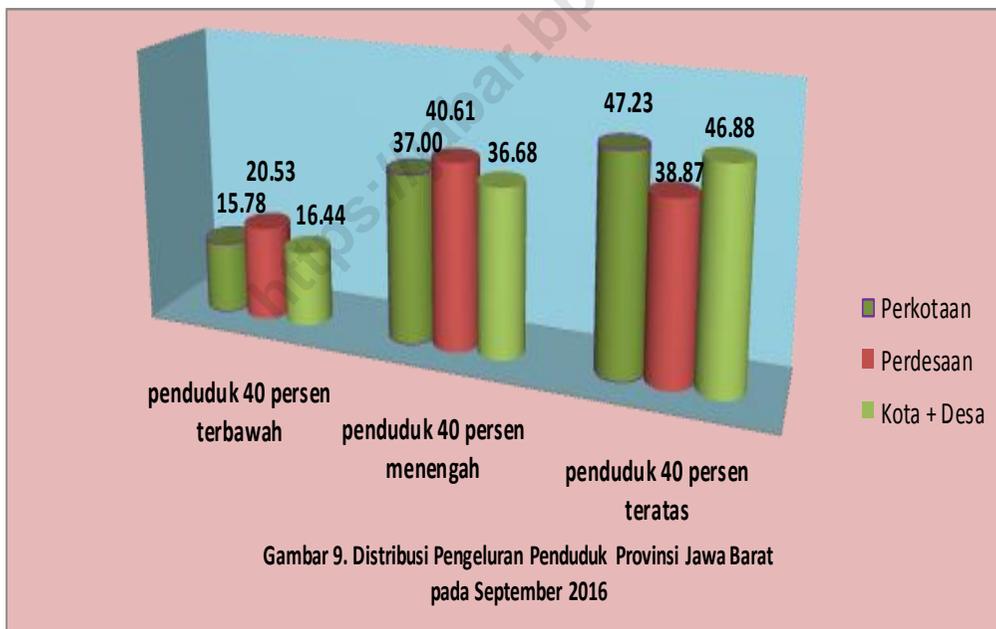


Sumber : Data Susenas 2015-2016

Perkembangan nilai Gini Ratio Provinsi Jawa Barat periode September 2015 – 2016 mengalami penurunan, ini merupakan hal yang baik. Dengan semakin menurunnya nilai Gini Ratio ini dapat diartikan bahwa distribusi pendapatan penduduk Jawa Barat semakin merata. Namun demikian, ketimpangan penduduk di Jawa Barat masih dalam kategori sedang. Pada September 2015, nilai Gini Ratio Provinsi Jawa Barat sebesar 0,426 dan menurun pada Maret 2016 di 0,413. Pada bulan September 2016, nilai Gini Ratio mengalami penurunan lagi dibandingkan Maret 2016 yaitu menjadi sebesar 0,402. Jika dilihat berdasarkan klasifikasi wilayah, dalam kurun waktu September 2015 – 2016, daerah perkotaan juga mengalami penurunan angka Gini Ratio dari 0,446 pada bulan September 2015 turun ke 0,423 di Maret 2016 dan turun lagi menjadi 0,412 pada kondisi September 2016. Namun lain halnya dengan perkembangan Gini Ratio wilayah pedesaan yang cenderung berfluktuatif angkanya. Pada September

2015, nilai Gini Ratio di perdesaan sebesar 0,310 naik menjadi 0,317 pada Maret 2016 dan kemudian turun lagi 0,310 pada bulan September 2016.

Selain menggunakan Gini Ratio, salah satu ukuran yang bisa digunakan untuk menggambarkan ketimpangan pendapatan adalah persentase pengeluaran pada kelompok penduduk 40 persen terbawah atau dikenal dengan ukuran ketimpangan Bank Dunia. Berdasarkan ukuran ini tingkat ketimpangan dibagi menjadi 3 kategori, yaitu tingkat ketimpangan tinggi jika persentase pengeluaran kelompok penduduk 40 persen terbawah itu nilainya ada di bawah 12 persen, kemudian ketimpangan sedang jika nilainya berkisar antara 12-17 persen serta ketimpangan rendah jika nilainya berada di atas 17 persen.



Sumber : Data Susenas 2016

Persentase pengeluaran pada kelompok 40 persen terbawah di daerah perkotaan Provinsi Jawa Barat adalah sebesar 15,78 persen. Ini Berarti penduduk di perkotaan tergolong pada kategori ketimpangan sedang. Begitupula di daerah perdesaan ada pada kategori ketimpangan

sedang dengan angka persentase pengeluaran kelompok 40 persen terbawah mencapai 20,53 persen. Namun kalau dilihat secara umum, pada kelompok 40 persen terbawah di Jawa Barat, persentase pengeluarannya ada pada kategori ketimpangan sedang dengan 16,44 persen.

VI. Penutup

Pada bulan September 2016, jumlah penduduk miskin atau penduduk yang berada di bawah Garis Kemiskinan Provinsi Jawa Barat sebesar 4,17 juta jiwa (8,77 persen). Jumlah ini mengalami penurunan sebesar 0,18 persen jika dibandingkan keadaan bulan Maret 2016.

Adapun Garis Kemiskinan (GK) Jawa Barat pada bulan September 2016 sebesar Rp 332.119,- per kapita per bulan. Ini mengalami peningkatan jika dibandingkan kondisi September 2015 (Rp 318.602,-). Pada bulan September 2016, peranan komoditi makanan terhadap Garis Kemiskinan (GK) masih mendominasi dibandingkan komoditi bukan makanan. Sumbangan Garis Kemiskinan Makanan (GKM) terhadap Garis Kemiskinan (GK) sebesar 71,95 persen.

Pada periode September 2015 - 2016, Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) dan Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) Provinsi Jawa Barat sama-sama menunjukkan penurunan. Ini mengindikasikan sudah adanya perbaikan kondisi pada penduduk miskin.

DATA

MENCERDASKAN BANGSA



**BADAN PUSAT STATISTIK
PROVINSI JAWA BARAT**

Jalan PHH. Mustafa No. 43, Bandung
Telp. (022) 7272595 - 7201696
<http://www.jabar.bps.go.id>